

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai sentral perekonomian Islam yang kemudian di dukung oleh semangat bank-bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah. Mulai dari itulah sistem perekonomian Islam mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian di Indonesia.

Perkembangan sistem ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga merambah pada tingkatan ekonomi mikro yang kemudian lahir lembaga keuangan mikro ekonomi Islam yang berorientasikan pada sosial keagamaan dan berbadan hukum koperasi yaitu lembaga keuangan BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Kemunculan BMT sangat berpengaruh untuk menunjang perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain untuk mencari keuntungan dalam usahanya, BMT juga memberikan pengetahuan – pengetahuan agama pada masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang sangat minim, sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan social keagamaan betul – betul terealisasi secara nyata. (Sumiyanto,2008:23)

Untuk menjaga perkembangan usahanya di dalam persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan lainnya, maka BMT perlu memperhatikan tingkat kesehatan keuangannya. Oleh karena itu BMT perlu melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian, serta pengungkapan pada laporan keuangannya yang sesuai standar yang telah di buat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia membuat standar dalam penyajian laporan keuangan untuk laporan keuangan BMT yaitu Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). SAK ETAP sendiri baru di terbitkan pada tanggal 17 Juli 2009 dan mulai berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2011. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan mereka. (Rizal,2013:7)

Dalam penyajian laporan keuangannya BMT boleh menggunakan PSAK atau SAK ETAP sesuai dengan kebutuhan BMT tersebut. Seperti yang telah di jelaskan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Pasal 3 “Koperasi sektor rill yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik Signifikan (SAK-ETAP) sedangkan Koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, laporan keuangannya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum)” dan pasal 4 “Koperasi sektor riil yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dapat beralih menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) tetapi ketika koperasi sektor riil telah menggunakan Standar Akuntansi Umum (SAK-Umum) tidak diperkenankan untuk kembali menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan pedoman akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersendiri” . (Permen KUKM No.12 Tahun 2015 pasal 3)

Berdasarkan keterangan diatas, maka pada penelitian ini peneliti ingin mengalisis lebih lanjut tentang kesesuaian implementasi SAK ETAP pada BMT Bima Magelang. Peneliti memilih objek atau lokasi penelitian di BMT Bima Magelang dikarenakan BMT Bima Magelang mulai menerapkan aturan SAK ETAP pada penyajian laporannya pada tahun 2013 dan menggunakan metode akrual basis, alasannya adalah BMT Bima Magelang menggunakan aturan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya adalah atas anjuran dari Auditor Eksternal BMT tersebut yaitu dari kementrian koperasi. Sebelum menggunakan pedoman SAK ETAP, BMT Bima Magelang menggunakan

pedoman PSAK Syariah yang metodenya menggunakan metode cash basis. Tetapi setelah peneliti melakukan observasi awal ke BMT Bima Magelang tentang kesesuaian antara aturan SAK ETAP dengan penyusunan laporan keuangan di BMT Bima Magelang, ternyata BMT Bima Magelang hanya menyusun laporan neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas, BMT Bima Magelang tidak menyusun laporan tersebut. Padahal menurut SAK ETAP laporan perubahan ekuitas sangat penting untuk memberikan informasi tentang penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan BMT Bima Magelang dengan pedoman SAK ETAP.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi atas pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan BMT Bima Magelang?

2. Bagaimana kesesuaian antara SAK ETAP dengan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan BMT Bima Magelang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan serta perlakuan akuntansi pada laporan keuangan BMT Bima Magelang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara SAK ETAP dengan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan BMT Bima Magelang

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi kepada para ahli perekonomian syariah khususnya pada BMT untuk lebih memperhatikan lagi dalam pencatatan laporan keuangannya.
 - b. Memberikan gambaran secara umum tentang isi pedoman SAK ETAP.
 - c. Menjadi pembanding antara aturan yang di muat di dalam SAK ETAP dengan praktik di lapangan pada BMT Bima Magelang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hal melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan SAK ETAP pada laporan keuangan BMT.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dilakukan untuk membantu lembaga tersebut dalam operasionalnya yang di harapkan bisa lebih sesuai dengan pedoman SAK ETAP mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan.